

Gatra Matra Jogja, Mudahkan Akses Informasi Tata Ruang

YOGYA (KR) - Upaya Pemkot Yogya dalam memudahkan akses informasi kepada masyarakat perihal tata ruang, mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Melalui Gapura Aksesibilitas Terintegrasi Pemanfaatan Tata Ruang Kota Yogya (Gatra Matra Jogja), masyarakat bisa mengakses informasi termasuk layanan tata ruang Kota Yogya secara online.

Berkat inovasi Gatra Matra Jogja tersebut Pemkot Yogya berhasil meraih Bhumandala Award 2023. Penyerahan penghargaan itu diserahkan langsung oleh Deputi infrastruktur Badan Informasi Geospasial (BIG) Ibnu Sofyan kepada Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo di Discovery Kartika Plaza Hotel Bali, Senin (6/11) malam.

Pj Walikota Yogya Singgih Raharjo, mengungkapkan rasa syukurnya atas torehan tersebut. Menurutnya penghargaan itu dapat menjadi motivasi bagi jajaran Pemkot Yogya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

formasi secara mandiri. Layanan dapat diakses melalui gatramatra.jogjakota.go.id.

Singgih menjelaskan dokumen atau informasi tata ruang adalah dokumen publik sehingga masyarakat berhak mengetahui aturan mengenai ketentuan teknis tata ruang yang diberikan secara transparan dan akuntabel. "Kami meluncurkan Gatra Matra Jogja sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi ketentuan teknis tata ruang yang bisa diakses kapan saja dan dari mana saja," imbuhnya.

Adapun layanan yang dapat diakses melalui Gatra Matra Jogja di antaranya terkait aturan ketinggian bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan informasi teknis lainnya. Terbukanya akses informasi publik ini diharapkan berdampak pada meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan tata ruang sesuai dengan aturan yang berlaku. "Diharapkan terbukanya akses informasi mengenai ketentuan tata ruang akan berdampak pada meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan tata ruang sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.

Sementara Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (SKIG) Sumaryono, mengatakan penghargaan Bhumandala Award merupakan bentuk pengakuan



Pj Walikota Yogya menerima penghargaan Bhumandala Award 2023, Senin (6/11) malam.

BIG atas upaya Pemkot Yogya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan tata ruang kepada masyarakat. "Pemkot Yogya telah mengembangkan inovasi pemanfaatan informasi geospasial dalam tata kelola pemerintahannya sehingga berdampak pada produktivitas maupun efektivitas kinerja," ujarnya. **(Dhi)-f**

Rakernas LDII, Wujudkan SDM Profesional Religius



Presiden Jokowi membuka Rakernas LDII 2023.

YOGYA (KR) - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII DIY Ir Atus Syahbudin SHut MAgr PhD melihat dan merasakan semangat yang luar biasa dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII 2023. "LDII terus berikhtiar menjalani amal salih yang semakin efektif dan efisien menuju ke sana," ungkap Atus di sela mengikuti Rakernas.

Rekernas LDII digelar di Ballroom Gedung Serba Guna (GSG) Pondok Pesantren (Ponpes) Minhaajurrosyidin Jakarta Timur yang dibuka oleh Presiden RI Ir H Joko Widodo, Selasa (7/11). Rakernas mengambil tema 'Mewujudkan SDM Profesional Religius Dalam Bingkai NKRI Untuk Indonesia Emas 2045' dan berlangsung hingga 9 November.

Menurut Atus, DIY yang telah unggul pendidikannya tentu memiliki modal besar untuk mewujudkan SDM profesional religius beriringan dengan kebangsaan, keagamaan dan kesehatan. Rekernas diikuti 1.307 peserta yang hadir di lokasi. Sementara, yang menghadiri secara daring berada di 500 studio mini.

Presiden Jokowi menyampaikan, program pembangunan SDM profesional religius yang dicanangkan LDII sudah benar. Ia mengatakan, program LDII di bidang kebangsaan, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan mampu menciptakan sebenar-benarnya manusia Indonesia.

"Negara berkembang sulit maju tanpa membangun SDM," katanya.

Senada dengan Presiden Jokowi, Ketua Umum LDII, KH Ir Chriswanto Santoso MSc mengatakan, LDII telah memfokuskan pembangunan SDM Profesional Religius sejak 2018, "Kami memiliki '8 Program Kerja LDII untuk Bangsa', program kebangsaan, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan ditujukan untuk membangun SDM," tuturnya.

Ditambahkan KH Chriswanto, program lainnya berupa teknologi digital, ekonomi syariah, energi baru terbarukan, dan ketahanan pangan serta pelestarian lingkungan, ditujukan untuk membantu pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **(Dev)-f**

Uji Coba Contraflow Trans Jogja Patut Diapresiasi

YOGYA (KR) - Keputusan untuk melakukan uji coba contraflow Trans Jogja di Jalan Pasar Kembang yang beberapa waktu terakhir dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub), merupakan langkah berani. Oleh karena itu kebijakan uji coba contraflow Trans Jogja tersebut patut diapresiasi.

"Saya kira hal ini bisa dimulai di seluruh ruas satu arah yang ada di perkotaan. Jadi tidak hanya di Pasar Kembang atau perpanjangannya pada ruas-ruas Giratori. Lebih bermanfaat jika rute Trans Jogja bisa direkonsolidasi agar model dasarnya adalah rute ulang alik, bukan melingkar," kata Peneliti Senior Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dr Arif Wisnadi di Yogyakarta, Minggu (5/11).

Arif Wisnadi mengatakan, dengan rute ulang-alik maka rute counter-

flow bisa dinaikkan kelasnya menjadi dedicated lane dengan single track. Untuk itu perlu ada persiapan ruang persimpangan bus setiap 500 meter atau sesuai dengan headway yang dirancang. Apabila ada efek tundaan ketika satu lajur dibuat contraflow sebenarnya normal dan akan tercapai ekuilibrium baru, saat publik sudah paham dan terbiasa. Apalagi dengan ada aplikasi pemandu rute dengan GPS maka dinamika kepadatan bisa dikelola oleh pengguna jalan dengan bantuan sistem.

Keunggulan sistem con-

traflow yang dinaikkan kelasnya menjadi sistem single track akan menjadikan masyarakat Yogya tetap bisa melakukan mobilitas, bahkan seandainya terjadi gridlock (kemacetan total) akibat kendaraan pribadi.

"Guna menuju kesana, penting untuk memastikan penjagaan keselamatan di sepanjang rute. Zero incident dan accident harus jadi target kinerja. Sistem rambu, marka dan tilang elektronik ditingkatkan agar nanti tidak dibutuhkan mobilisasi petugas lapangan yang terlalu masif," terangnya. **(Ria)-f**

BPK SERAHKAN LHP KE PEMDA DIY Pemeriksaan Jadi Landasan Peningkatan Kinerja

YOGYA (KR) - BPK Perwakilan DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Aset yang Bersumber dari Dana Keistimewaan, Tahun Anggaran 2019-2023 pada Pemda DIY, di Kantor BPK Perwakilan DIY, Selasa (7/11). Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan tujuan menilai pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana keistimewaan.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara merupakan suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap kinerja yang telah dilaksanakan. Khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat.

"Hasil dari pemeriksaan kinerja ini mencakup temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang akan kami tindaklanjuti selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Ini adalah langkah konkret yang kami ambil untuk memastikan bahwa setiap hasil pemeriksaan dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang," ungkap Sultan.

Gubernur DIY mensmbshkan, momentum penyerahan LHP memiliki nilai

yang sangat penting dan strategis bagi para pengguna anggaran. Hal itu diharapkan dapat membantu para instansi terkait dalam menjaga ketertiban administrasi dalam pengelolaan keuangan, sehingga anggaran dapat digunakan dengan penuh efektivitas dan akuntabilitas.

Dalam konteks yang lebih luas, LHP juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, tertib, berwibawa dan akuntabel. "Kita semua menyadari betapa pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan yang baik dan transparan. Dengan terwujudnya cita-cita ini, kita yakin bahwa kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan lebih baik," imbuhnya.

Selain penyerahan LHP kepada Pemda DIY, dilakukan pula penyerahan LHP pada Pemerintah Kabupaten Kulonprogo atas efektivitas pengelolaan PBB-P2 dan PT Bank BPD DIY atas efektivitas pengelolaan dana pihak ketiga dan perkreditan.

Sementara Kepala BPK Perwakilan DIY, Widhi Widayat menyatakan, pemeriksaan kinerja pengelolaan aset yang bersumber dari dana keistimewaan, dilatarbelakangi pertimbangan BPK untuk memberikan masukan kepada Pemda DIY dalam mengelola dana keistimewaan yang telah diperoleh sejak tahun 2013 sampai saat ini.

Dengan dana yang semakin meningkat, tentu terjadi pula peningkatan aset yang signifikan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami memang menemukan beberapa permasalahan. Kami harap permasalahan ini dapat segera diatasi agar tidak mempengaruhi efektivitas upaya pencapaian tujuan kinerja pada masing-masing entitas. Kami tunggu selambat-lambatnya 60 hari mulai hari ini untuk tindaklanjutnya," imbuhnya.

Ketua DPRD DIY, Nuryadi menyatakan, mengingat pentingnya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan membuat pihaknya mengapresiasi proses pengawasan yang dilakukan BPK. Dan kepada Gubernur DIY, ia pun berterima kasih karena telah berupaya maksimal dalam mengelola aset yang bersumber dari dana keistimewaan sehingga dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat DIY.

"LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Aset yang Bersumber dari Dana Keistimewaan TA 2019-2023 pada Pemda DIY ini menunjukkan Pemda DIY telah bertanggung jawab serta telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini juga memberikan rekomendasi yang perlu kita perhatikan bersama dalam menjalankan tugas ke depannya," imbuhnya. **(Ria)-f**

DPRD KOTA YOGYAKARTA

SUARA WAKIL RAKYAT

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

BUKTIKAN KOTA YOGYA MAMPU MANDIRI

Kaji Ulang B2B Pengelolaan Sampah

Sigit Wicaksono

Fraksi Partai NasDem

usaha bicaranya bukan soal keuntungan. Kita harus menyiapkan anggaran untuk itu. Mahal tidak apa-apa tetapi itu kan akan terus kita gunakan. Masyarakat selama ini sudah patuh membayar pajak, seharusnya diimbangi dengan pelayanan yang prima," urainya.

Ketika persoalan hajat itu diserahkan ke pihak swasta, maka kemandirian akan sulit diwujudkan. Apalagi jika kelak terjadi masalah darurat sampah, jangan sampai justru pemerintah lepas tangan dan mendesak masyarakat untuk mandiri. "Selama ini kan masyarakat selalu dituntut menghemat, menekan volume sampah, tapi kemudian masyarakat juga yang akhirnya dibebani," imbuhnya.

Oleh karena itu, Sigit berharap Pemkot mampu membuktikan jika mampu mandiri kelola sampah tanpa tergantung dengan swasta. Lahan terbatas bukan menjadi sandungan sepanjang ada kepastian dan ketegasan. Proses pembangunan badan layanan usaha maupun pengadaan teknologi untuk pengolahan sampah juga harus transparan agar masyarakat dapat mengawal.

"Sampah kan tidak sekali saja tapi seterusnya. Seharusnya negara hadir sendiri sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajibannya. Apalagi ini sudah menjadi kebutuhan dasar," katanya. **(Dhi)-f**

PENGUMUMAN					
(Tentang Sertipikat Hilang)					
No : 9680 /PENG-33.01.HP.03.02/X/2023					
Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :					
No	a. Nama Pemohon b. Alamat	c. Jenis Hak d. No. Hak e. Luas	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pembukuan di Kantor	Letak Tanah di Kecamatan
1	a. ADHILA NUGRAHENI PRASETYA b. Jalan RT.003 RW.000 Temantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul	a. Milik b. 750 c. 72 m ²	VINCENTIA SITI SUBEKTI	20/08/1999	a. Tegallampayan b. Cilacap Selatan
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan pengantian sertipikat tersebut di atas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.					
Yogyakarta, 30 Oktober 2023 Kepala Kantor Pendaftaran Pendaftaran Tanah					